

Globalisasi Media dan Informasi: Sebuah Wacana Perspektif Kapitalisme Global

Oleh:

**Amin Taufiq Kurniawan
Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro**

amintaufiq@undip.ac.id

Abstrak

Tulisan mengenai globalisasi informasi dan media ini merupakan sebuah gagasan konseptual untuk memahami bagaimana kuasa kapitalis global semakin menguatkan pada premis bahwa siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai dunia. Perkembangan arus informasi global semakin menunjukkan bahwa kecenderungan munculnya bipolarisasi kekuatan produsen informasi yang bersifat informasi di dunia lama dan informasi di dunia baru. Dalam kerangka perubahan sosial, kapitalisme informasi yang telah menjadi ideologi dan hegemoni terkuat saat ini merupakan sebuah perjalanan yang bersifat *unfinished project* yang melibatkan seluruh spektrum dimensi global. Berawal dari konsep produksi dan kesejahteraan negara (*The Wealth of Nations*) kapitalisme telah menjelma menjadi sistem dunia yang bersifat *omnipresent* (hadir dimana-mana). Kondisi demikian yang bagi sebagian dianggap sebagai bentuk embrio kesenjangan informasi dimana kontrol arus informasi menjadi dominan oleh korporasi transnasional.

Kata Kunci: globalisasi informasi, kapitalisme media massa

Abstract

*This paper is construct about spread of globalization of media and information and this is a conceptual idea to understand how the global capitalist power reinforce the premise that “who controls the information then he will rule the world”. Further developments indicate that tendencies global information are fragmented between information in the old world and new world in. Towards social change frameworks, capitalism of information has become the most powerful ideology and haegemony, still remains become unfinished project involving the entire spectrum of global dimensions. Starting from the concept of production and the welfare state (*The Wealth of Nations*), Information has been transformed into a capitalist world system that become omnipresently consumed. This conditions for the majority regarded as an embryonic form of information gap where information flow control predominantly controlled by transnational corporation.*

Keywords: globalization of information, mass media capitalism

Pendahuluan

Latar Belakang

Secara historis untuk dapat membuat refleksi teoritis mengenai kapitalisme maka perlu melihat perkembangan dari masa kemunculannya dari dunia lama sampai pada tataran kontemporer yaitu kapitalisme global dan kapitalisme lanjut. Menurut Ebenstein dan Fogelman perkembangan kapitalisme dilihat dari dimensi sejarahnya merupakan bagian dari gerakan individualisme (Ebenstein dan Fogelman, 1994: 148). Didalamnya mengandung pengertian bahwa kapitalisme merupakan sistem sosial yang menyeluruh lebih dari sekedar tipe perekonomian tertentu. Kapitalisme sebagai sebuah sistem dunia dapat dirunut dari fakta sejarah sejak orang-orang Eropa abad 16 mulai berdagang, menaklukkan, dan merampas ke seluruh penjuru dunia.

Gelinas (2003) secara kronologis membagi masa-masa pra kapitalisme klasik yang bermula dengan perjalanan pelaut-pelaut ke dunia baru dan menemukan berbagai komoditi terutama pertanian dan perkebunan sebagai komoditas perdagangan (Gelinas, 2003: 4-11). Berikut adalah rentang masa kapitalisme klasik:

1. *Masa-Masa Merkantilisme* (1498-1763), tercatat gelombang pertama proses internasionalisasi perdagangan dimulai sekitar akhir abad kelima belas saat para pelaut Eropa menjelajahi ke berbagai dunia. Pelayaran pertama meliputi Bartholomeus Diaz (1448) dan Christopher Columbus (1492). Tercatat pula pembukaan jalur pelayaran ke India Timur oleh Vasco da Gama (1498). Saat itulah era perdagangan ke seluruh penjuru dunia dimulai. Era ini juga disebut sebagai *primitive accumulation* (Gelinas, 2003: 5) yang mengandalkan penaklukkan, perampasan, genosida, penguasaan atas tanah, dan penjajahan. Pada rentang historis ini Inggris menjadi negara dengan koloni terbesar di dunia dan membuktikan dominasinya dibanding negara Eropa lainnya. Masa merkantilisme ini juga ditandai oleh penguasaan komoditas pertanian, perdagangan lewat laut, kolonisasi, dan sistem perbudakan yang berlangsung selama tiga abad.
2. *Era Ekspansi Kapitalis* (1763 – 1883), gelombang kedua ini muncul pada pertengahan abad ke 18 ditandai dengan adanya sistem produksi dan industri yang mempengaruhi proses perdagangan internasional. Perbedaan utama era ini dengan

3. masa merkantilisme adalah penonjolan pada sistem produksi yang mengandalkan sumber daya internal, bukan pada eksternal. Revolusi Industri Inggris adalah tonggak sejarah era ini (Gelinias, 2003: 6) terutama ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Maka mulailah era dimana sistem produksi yang berbasis pada modal (*capital*).

Pada masa kapitalisme klasik juga ditandai dengan dominasi Inggris pada pertengahan abad ke 19 atas pasar dunia terutama di negara-negara koloninya termasuk Amerika Serikat yang pada masa itu masih berkutut dengan permasalahan perbudakan dan perang sipil (Gelinias, 2003: 6). Selain itu pola-pola perdagangan bangsa monarki sangat berpengaruh dalam perdagangan maupun produksi. Inggris lalu mengeruk sumber daya alam meliputi logam, dan rempah-rempah (komoditas pertanian) untuk memenuhi permintaan industri-industri skala besar. Era kolonialisasi ini telah meletakkan landasan sistem kapitalisme moderen dan global yang merupakan hasil pemikir liberalisme semacam Adam Smith, David Ricardo maupun Karl Marx sebagai oposisinya.

1. 2. Sekilas Konsep Kapitalisme Moderen

Masa awal dari kapitalisme moderen dimulai pertengahan abad 19 sampai awal abad 20. Era ini ditandai dengan meningkatnya industrialisasi di Amerika Serikat pasca perang sipil terutama munculnya korporasi multinasional di bidang perminyakan. Salah satunya adalah John D. Rokefellar yang menciptakan *Standard Oil Trust* yang memonopoli hampir 90 % komoditas perminyakan dan transportasi (Gelinias, 2003: 9). Bisnis-bisnis besar Amerika Serikat ini menandai revolusi kedua dalam sejarah kapitalisme terutama era perusahaan multinasional yang akan berkembang menjadi perusahaan transnasional (TNC).

Ebestein dan Fogelman mengemukakan beberapa sifat dasar yang mencirikan kapitalisme moderen terutama pada awal-awal perkembangannya (Ebestein dan Fogelman, 1994: 148-152):

1. Pemilikan perorangan (*individual ownership*); dalam sistem kapitalis kepemilikan alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin, sumber daya alam) dikuasai oleh perorangan bukan oleh negara.
2. Perekonomian pasar (*market economy*) melibatkan konsep penawaran dan permintaan yang melibatkan konsumen yang secara kumulatif cenderung menentukan nilai transaksi.
3. Persaingan (*competition*); melibatkan penentuan harga yang bebas melibatkan produsen dan konsumen oleh otoritas kenyataan (*de facto authority*).
4. Keuntungan (profit); terkait dengan penentuan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Industri yang mengalami peningkatan pesat meliputi industri listrik, kimia, dan mesin-mesin. Sehingga pada akhir abad ke-19 Amerika Serikat menjadi kekuatan industrial paling berkuasa. Sementara Inggris Raya memegang kekuasaan dalam perdagangan. Selain itu kemunculan korporasi multinasional dikatakan menandai berdirinya sistem administrasi ekonomi moderen yang secara revolusioner juga merupakan jalur awal dalam melakukan konsep bisnis modern (Halwani, 2002: 224).

Sementara itu Gelinis menyebutkan bahwa salah satu gejala yang muncul pada masa-masa awal kapitalisme moderen adalah mulai dikenalnya konglomerat pemegang berbagai kerajaan bisnis (Gelinis, 2003: 10). Nama-nama seperti John D. Rockefeller, Andrew Carnegie pengusaha baja, Pierepont pengusaha keuangan, dan Henry Ford sebagai pionir industri otomotif di Amerika Serikat. Pada masa ini pula, konglomerat industri menguasai kehidupan sosial ekonomi di Amerika Serikatterutama yang memiliki berbagai perusahaan multinasional.

Beberapa perusahaan multinasional di Amerika Serikat sebanyak 60 % dimiliki oleh individual pada dekade menjelang depresi ekonomi. Perusahaan juga turut andil dalam konsentrasi kepemilikan saham yang banyak dikuasai juga secara individual oleh para konglomerat. Ebestein dan Fogelman mengemukakan sekitar 50 perusahaan industri terbesar di Amerika Serikat mempunyai andil dalam 80 % dari total hasil penjualan sektor industri (ebestein dan Fogelman, 194: 154). Kondisi ini lalu berdampak:

1. Hilangnya perusahaan-perusahaan kecil dari perekonomian Amerika Serikat
2. Kepemilikan perusahaan tidak lagi mengenal sistem aristokrasi, melainkan pengelolaan secara professional (Ebestien dan Fogelman, 1994: 155)

Salah satu penanda terpenting kapitalisme moderen berikutnya adalah depresi ekonomi (*Great Depression*) tahun 1929. Optimisme kelas bisnis mencapai anti klimaks saat kejatuhan saham di NYSE (New York Stock Exchange) tanggal 24 Oktober 1929. Produksi dunia turun hingga 40 % dan perdagangan dunia hingga 30 % pada interval 1929 – 1933. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai puncaknya di tahun 1933 yang mencapai 33 % dari penduduk saat itu. Bahkan pendapatan nasional (GNP) AS turun dari 85 miliar dollar menjadi 42 milyar dollar. (Gelinas, 2003: 13). Kondisi depresi ini membuat kelesuan dan dampak terhadap kapitalisme yang cukup berat bagi dunia saat itu.

Dalam perkembangannya, setelah melalui masa depresi ekonomi yang hebat terjadi pergeseran dalam kebijakan Amerika Serikat. Kalangan elit Amerika Serikat menilai bahwa kegagalan terdahulu adalah akibat “kegagalan sistem ekonomi internasional”. Lalu dibentuk CFR (*Council on Foreign Relations*) atas prakarsa F.D. Rosevelt yang bertugas antara lain membangun kepentingan Amerika. Kerja tim ini dimulai dengan slogan “*America First, Bussiness First*” dengan fokus tugas untuk:

1. Akses bisnis bagi semua produk ke seluruh penjuru dunia
2. Akses bebas ke seluruh pasar asing bagi seluruh produk, barang, dan jasa Amerika Serikat.
3. Pergerakan bebas kapital ke seluruh penjuru dunia (Gelinas, 2003: 13).

Maka kebangkitan para kapitalisme pasca era Inggris ini didominasi oleh Amerika Serikat yang kemudian meletakkan landasan terjadinya globalisasi ekonomi. Kapitalisme moderen juga menandai berdirinya organisasi serikat buruh yang muncul baik di Eropa maupun Amerika Serikat yang semakin menegaskan kesenjangan antara kelas pekerja dan pengusaha. Konteks buruh sebagai komponen produksi ini merupakan ciri khas era kapitalisme moderen yang menonjolkan pada aspek produksi (Ebestien dan Fogelman, 1994: 158).

1. 3. Kapitalisme Lanjut (*Late Capitalism*)

Gelinas menandakan era kapitalisme lanjut dari 1980-an sampai sekarang. Ditandai dengan membesarnya korporasi di Amerika Serikat melalui evolusi korporasi transnasional (TNC) yang juga mengindikasikan bergesernya arah kapitalisme dari yang berbasis pada produksi menjadi kapitalisme yang berbasis konsumsi (Gelinas, 2003: 16). Kapitalisme lanjut ini terjadi karena ekspansi perusahaan TNC dan perluasan produksi barang dan jasa yang lebih menekankan pada spektrum konsumen. Walaupun demikian tetap mempertahankan komponen alat produksi sebagai basis utama untuk melakukan ekspansi tersebut.

Menurut Thompson, kecenderungan kapitalisme lanjut banyak menciptakan kebutuhan dengan begitu banyak mendirikan domain-domain baru dalam eksplorasi modal. Budaya global sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk komodifikasi, kemersialisasi, dan konsumerisme dalam kapitalisme lanjut yang dikendalikan industri-industri komunikasi, periklanan dan media dalam rangka memaksimalkan keuntungan (Thompson, 2004: 151).

Melalui perkembangan baru semisal teknologi dan informasi, TNC dan perusahaan besar semakin berkembang melalui berbagai proses merger, aliansi, dan pengambilalihan perusahaan. Arus revolusi informasi di tahun 1980-an yang ditandai dengan perkembangan luar biasa bidang telekomunikasi, komputerisasi dan otomatisasi peralatan memainkan peran penting dalam proses peralihan perusahaan multinasional dan TNC. Menurut Gelinas adanya perangkat baru ini menyebabkan banyak perusahaan tersebut melakukan ekspansi yang sifatnya melebihi batas-batas dalam cakupan waktu, wilayah, negara, bahasa, budaya, dan hak kepemilikan (*courtesy*) (Gelinas, 2003: 16-17).

Berbagai pilihan-pilihan gaya hidup yang bersandar pada konsumerisme sebagai citra yang dipasarkan, dan bersiat terdiversifikasi pada kebutuhan-kebutuhan konsumen yang sifatnya personal dan dasar. Kapitalisme lanjut ini menurut Budrillard (dalam Thompson, 2004: 155) berfokus pada konsumen. Kontrol yang semula ditujukan pada pekerja dan buruh sebagai komponen produksi beralih menjadi

kontrol atas konsumen. Kapitalisme lanjut menciptakan konsumsi massa serta menciptakan apa yang dibutuhkan konsumen.

1. 4. Landasan Konsep Adam Smith dan Karl Marx

Beberapa pemikir awal kapitalisme yang menjadi acuan ideologi kapitalisme muncul sebagian besar berasal dari gagasan-gagasan Adam Smith (1723-1790) sebagai bapak ekonomi dan pengkritiknya Karl Marx (1818-1883) sebagai bapak sosialisme. Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *An Inquiry into The Nature and Cause The Wealth of Nations* memberi landasan pokok untuk upaya mencari faktor-faktor kesejahteraan sebuah negara. Smith melihat setiap individu yang menjadi anggota masyarakat pada dasarnya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi menurut Smith sentimen tersebut dapat digerakkan untuk mencapai kesejahteraan bangsa (*Welfare State*). Maka muncul prinsip mengenai pasar bebas, pembagian kerja dan sebagainya sebagai syarat mencapai kesejahteraan (Wijanarko, 2004: 22).

Smith juga memberi pandangan bahwa perilaku manusia secara alamiah didorong oleh enam jenis motivasi meliputi (1). Kepentingan pribadi; (2). Unsur simpati; (3). Hasrat kelakuan bebas; (4). Kecenderungan menjaga sopan santun; (5). Kebiasaan bekerja; dan (6). Kecenderungan tukar menukar barang dalam transaksi jual beli (Wijanarko, 2004: 22). Dengan serangkaian motivasi itu, hanya individu terkaitlah yang mengetahui kepentingan dan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu menurut Smith, setiap individu harus diberi kebebasan memelihara kepentingan melalui caranya tersendiri. Persaingan dan benturan yang mungkin timbul antar individu itu akan diarahkan pada kemajuan bersama. Faktor itulah yang akan bersumber pada tata susunan masyarakat yang akan menjaga keseimbangan ekonomi.

Sejalan dengan gagasan itu, Gelinan memberikan seperangkat asumsi-asumsi dalam teori Adam Smith yang pada saatnya telah melandasi dalam sistem ekonomi moderen yang diamplifikasi menjadi pondasi ideologi kapitalis meliputi:

- Basis psikologi*; hasrat egois dari setiap individu.
- Penggerak*; dorongan personal

- Mekanisme pengaturan dan menetapkan struktur*; pasar akan diatur oleh hukum permintaan dan penawaran
- Pengorbanan dan hak-hak penguasaan*, meliputi inisiatif kepemilikan (Gelinis, 2003: 103).

Sedangkan Karl Marx, intelektual asal Jerman yang tinggal di Inggris, memberikan kritik pada gagasan yang dikembangkan Adam Smith dan pengikutnya semacam David Ricardo dan Keynes. Poin utama kritiknya adalah pada suatu masa ketika mekanisasi dan sistem produksi industri secara efisien akan mendapatkan tantangan baru yang berasal dari dalam komponen operasi-operasi mesin industri yaitu pada pekerja atau buruh. (Gelinis, 2003: 105).

Hakikatnya bagi Marx, suatu faktor utama yang melandasi asal mulanya suatu sistem perekonomian dan kapitalisme adalah pertaliannya yang erat dalam perluasan pembagian kerja. Termasuk didalamnya tentang pengambilalihan hak para produsen atas penguasaan sarana-sarana produksi mereka. Sehingga kapitalisme merupakan suatu masyarakat kelas yang mengandalkan pembagian struktur antara kelas borjuis (pemilik modal dan pengusaha) dan kelas yang terbawahi (pekerja dan buruh). Menurut Giddens, kapitalisme menurut Marx adalah sistem produksi komoditi (Giddens, 1985: 294). Pengambilalihan hak para pekerja secara materiil atas sarana produksinya merupakan cara pembentukan sistem kelas pada masyarakat borjuis yang dilandasi oleh penguasaan atas modal

Marx mengajarkan bahwa alat-alat produksi di dalam masyarakat menentukan sifat dari masyarakat itu. Ini merupakan pemikiran linier dasar dari Marxisme, hubungan dasar suprastruktur. Perekonomian merupakan dasar dari semua struktur sosial. Dalam sistem-sistem kapitalis, keuntungan menggerakkan produksi dan karenanya mendominasi buruh (Littejohn, 2002: 123)

Kelompok-kelompok kelas pekerja ditekan oleh kelompok-kelompok yang lebih kuat yang bersandar pada keuntungan. Semua institusi yang memperkuat dominasi di dalam sebuah masyarakat kapitalis dimungkinkan oleh sistem perekonomian. Hanya bila kelas pekerja bangkit melawan kelompok-kelompok dominan ini alat-alat produksi bisa diubah dan pembebasan buruh bisa tercapai.

Pembebasan ini membuat kemajuan alamiah yang lebih maju dalam sejarah dimana kekuatan-kekuatan penekan berbenturan dengan sebuah dialektis yang mengakibatkan munculnya sebuah tatanan sosial yang lebih tinggi. Teori marxist klasik ini disebut *analisis ekonomi politik* yang banyak melandasi dalam mengkaji fenomena kapitalisme moderen. (Littlejohn, 2002:123).

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel mengenai komunikasi ilmiah ini pada dasarnya merupakan bentuk penjabaran gagasan konseptual yang berusaha mendeskripsikan berbagai konsep awal mengenai bagaimana globalisasi media dikonseptualisasikan dalam variabel dan indikator yang dapat diukur dan didefinisikan terutama kaitannya dengan konsep kapitalisme ekonomi. Hal ini tentu saja berimplikasi pada sejauhmana penggunaan aspek metodologinya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dimana studi literatur dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber dokumen baik tekstual (sumber primer) maupun dokumen elektronik. Dokumen yang ditelusur dalam dalam gagasan konseptual ini menekankan pada kemutakhiran dan keaktualitasan dari informasi yang dikandungnya, sehingga validitas sumber dapat dipertanggungjawabkan

Keterbatasan dalam penulisan ini tentu saja juga menyangkut aspek metodologis, dimana seharusnya konsep ini dapat dilakukan pendekatan melalui metode yang lebih komprehensif baik yang berjenis kuantitatif maupun kualitatif. Diharapkan, melalui pemakaian metode yang tepat, gagasan konseptual mengenai globalisasi informasi dan media dapat dikembangkan secara luas. Perspektif yang dilihat menjadi lebih luas daripada hanya sekedar studi literatur secara deskriptif

3. Kuasa Kapitalisme Dan Arena Organisasi Global

3. 1. Arah Multipolarisasi Globalisasi Ekonomi

Perkembangan kapitalisme global tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip ekonomi klasik yang sampai saat ini terus dipertahankan bahkan pada domain-domain yang tidak terbayangkan akan mengalami proses-proses transformasi ideologi

pasar tersebut. Kapitalisme sebagai sistem dunia yang bermula pada awal abad ke-16 ketika orang-orang Eropa berhamburan keluar dari sudut kecil dunia untuk berdagang menaklukkan, dan merampas, semakin menunjukkan kejayaannya terutama sejak runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya era perang dingin (Gelinis, 2003: 16). Kapitalisme global secara simbolik telah memulai masa dimana kemenangannya atas komunisme dan sosialis ditandai dengan berjayanya jargon demokrasi dan pasar bebas. Mesin ekonomi global mulai diciptakan oleh kapitalisme melalui instrumen-instrumennya mencari eksistensi kehidupan melalui ekspansi modal dan penimbunan keuntungan (*profit*). Sehingga kuasa ekonomi makro (kapitalisme) mulai bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis pada permintaan dan penawaran. Hal yang sama masih berlangsung hingga detik ini, ketika indikator perekonomian kontemporer juga mengamplifikasi jurus ampuh *supply* dan *demand* menyasiasi kemajuan jaman.

Lalu dimanakah arena dari transformasi yang mungkin terjadi? Institusi apa yang sampai sekarang berperan sebagai wadah yang mengiringi kemajuan kapitalisme global? Bagaimanakah keterkaitan yang dapat kita lihat dengan kondisi global yang telah mencapai tataran konvergen ini? Tentu dapat kita temui lewat perkembangan kontemporer global dari multipolarisasi dunia lewat beberapa *legal parlement* maupun organisasi kawasan yang ada semisal UN (PBB), APEC, G8, UE, ASEM, dan sebagainya (Halawani, 2002: 250). Berbagai macam bentuk multipolarisasi di berbagai kawasan dunia tersebut tampaknya merupakan arena domain baru dalam melihat perspektif ideologi pasar kontemporer yang berkembang.

Karakteristik persamaan tujuan seperti di organisasi pada umumnya tampak terlihat sebagai kekuatan utama munculnya kelompok-kelompok global tersebut. Tentu saja dapat kita cermati bahwa hampir semua dari tujuan bersama yang ingin dicapai kelompok-kelompok global tersebut adalah sama yaitu ekonomi dan perdagangan. Hal ini bukan sesuatu yang alamiah terjadi (*by nature*) melainkan dorongan artifisial dari komponen otoritas masing-masing negara yang terlibat. Sekali lagi hukum pasar berbicara.

Wacana kecurigaan yang muncul dari kedua elemen (antara kapitalisme dan asosiasi global) akhirnya membawa kita pada sebuah arena dimana kapitalisme mengendalikan dan menjadi semacam ideologi yang disebarkan melalui asosiasi global semacam PBB dan UE. Maka menurut pendapat David C. Korten, bahwa dalam kapitalisme, demokrasi pun dapat dijual kepada penawar tertinggi dan bahwa pasar bebas tersebut direncanakan secara terpusat oleh megakorporasi yang bahkan ukuran sebenarnya lebih besar dari banyak negara yang ada (Korten, 2002). Tidak mengherankan arena kerjasama global maupun regional yang mungkin awalnya dibangun atas kesadaran untuk saling membantu, bahkan sampai tataran parlementer, tidak lepas dari jerat kuasa kapitalisme global bahkan turut menjadi ranah dimana ikut membesarkan dan menghidupinya. Domain asosiasi regional dan internasional tersebut mulai dilandasi ideologi untuk mengeruk keuntungan dari lawan-lawan mereka. Maka ketahanan modal adakalanya menjadi bentuk ideologi mendasar dalam kerjasama tersebut.

Salah satu asumsi yang diungkap George Soros dalam tesisnya mengenai konsep *Open Society* dari Karl Popper dan kritiknya mengenai kapitalisme dikemukakan bahwa kapitalisme global telah menyebabkan negara-negara pusat berusaha menjadi majikan negara-negara pinggir – dalam istilah Soros *periphery* – dengan mengendalikan pertumbuhan ekonomi mereka (Soros, 2006). Dengan asumsi tersebut maka beberapa lembaga internasional hasil bentukan beberapa asosiasi kesepakatan global seperti *International Monetary Fund* (IMF) maupun *World Bank* pada dasarnya merupakan alat kuasa kapitalisme. Kedua lembaga tersebut dikatakan Soros merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh negara-negara sentral agar tetap bisa menguasai dan mengontrol negara-negara *peripheral* (negara berkembang dan terbelakang). Dengan kata lain sebagai seorang spekulan yang juga mendapat keuntungan dari kapitalisme, Soros telah memulai wacana kritis dalam memahami posisi atau disposisi kapitalisme sebagai anak emas dalam arena polarisasi kerjasama internasional yang tidak lebih hanya sebagai upaya mencari eksistensi keuntungan.

3. 2. *United Nations: Arena Megakorporasi Internasional*

Pada musim panas 1944, lima belas bulan sebelum berakhirnya Perang Dunia II, F. D. Roosevelt merancang sebuah konferensi masif yang pada perkembangannya menjadi landasan tatanan ekonomi dalam tubuh PBB. Konferensi Keuangan dan Finansial (*The United Nation Monetary and Financial Conference*) yang diadakan di Bretton Woods New Hampshire Juli 1944 dikatakan Gèlinas menandai sejarah awal perkembangan tatanan ekonomi baru yang mendasarkan pada 3 pilar utama yaitu Bank Dunia, IMF, dan GATT (yang pada tahun 1995 berubah menjadi WTO) dan tentu saja di bawah kontrol Amerika Serikat (Gèlinas, 2003: 126). Konferensi Bretton Woods ini awalnya bertujuan untuk membuat kerangka institusional mempromosikan investasi asing dan regulasi transaksi finansial diantara 169 delegasi resmi termasuk USSR (Uni Soviet) yang pada akhirnya menolak menandatangani kesepakatan tersebut. Tampak kuasa dan aroma megakorporasi dari kapitalisme mulai bersemi bahkan di organisasi, yang apabila kita menilik Pembukaan Piagam PBB, didirikan atas dasar perdamaian, keadilan dan kesejahteraan (*Peace, Justice, dan Prosperity*).

Implikasi di era millennium ini adalah bahwa PBB dapat dipandang sebagai organisasi yang tidak lebih hanya mengambil sebagian roh kapitalisme dan menjadi arena baru yang dikendalikan oleh negara-negara adikuasa tempat leluhur kapitalisme tersebut yaitu Inggris dan Amerika Serikat.

Melalui ECOSOC (*The Economic and Social Council*) yang dibentuk sebagai komponen PBB dalam misi ekonomi dan sosial, maka kontrol atas Bank Dunia, IMF dan WTO pada satu sisi membawa ironi ketika banyak badan PBB seperti FAO, UNICEF, UNESCO, WFP, UNDP dan sebagainya seperti menjadi antitesis dari kontrol tersebut. Terlebih lagi banyak kebijakan yang dicetuskan dan menjadi kesepakatan di tingkat PBB seperti MDGs atau Protokol Kyoto dirancang oleh beberapa negara pemilik megakorporasi kepada negara-negara dunia ketiga. Ditambah lagi akan semakin ironis ketika badan-badan PBB tersebut sekitar 90 persen beroperasi di negara-negara berkembang. Tidak mengherankan ketika kita lalu mencium aroma kuat kapitalisme dalam konstelasi global misi-misi PBB.

Maka perubahan yang dapat dicermati melalui arena seperti PBB adalah sekalipun mekanisme pasar adalah karakteristik yang khas dalam kapitalisme, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat mengendalikan domain-domain yang bersifat non-pasar. Maka tidak mengherankan ke depan arena PBB dapat menjadi sebuah potret dan gambaran atas kuasa kapitalisme yang menjadikan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan mulai didefinisikan melalui terminologi uang. Konversi penerapan ideologi pasar ke dalam konteks dan wilayah di luar bisnis dan ekonomi ini akan menjadikan PBB sebagai arena bermain baru megakorporasi dan korporasi transnasional.

3. 3. *International Monetary Fund (IMF)*

Selama Perang Dunia Ke-II, pemerintah Inggris mencanangkan rencana “*Clearing Union*” dan pencetusnya Lord Keynes sedangkan Amerika Serikat memiliki dana stabilisasi dan pencetusnya Harry White (Halwani, 2002: 26). Beberapa ide yang melandasi terbentuknya IMF

1. Untuk meningkatkan jumlah cadangan negara yang memungkinkan negara tersebut mengatasi depresi tanpa melakukan kebijakan deflasi, devaluasi, dan pembatasan impor. Baik devaluasi dan pembatasan impor akan menimbulkan lingkaran setan yang akan membantu suatu negara yang bersifat sementara dan akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang.
2. Untuk memperbaiki posisi ketidakseimbangan neraca pembayaran, ide Keynes adalah untuk menciptakan mekanisme internasional dengan memberikan cara yang baik untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam posisi neraca pembayaran.
3. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa upaya suatu negara dalam mengulangi ketidakseimbangan neraca pembayaran adalah melakukan devaluasi.
4. Keynes melemparkan ide untuk mendirikan bank sentral yang dapat memberikan kredit dengan skala dunia, seperti yang dilakukan bank-bank sentral di tiap negara (Halwani, 2002: 261).

Sebagai realisasi tersebut, IMF didirikan pada tahun 1944 pada konferensi internasional yang ada di Bretton Wood, New Hampshire, dan beroperasi mulai tanggal 1 Maret 1947. setiap negara anggota menyumbang sejumlah dana dalam mata uang masing-masing pada IMF. Negara anggota dapat meminjam mata uang asing dengan syarat-syarat tertentu. Melalui cara tersebut peminjam dapat menghindari kenaikan nilai tukar. Nilai tukar telah ditetapkan oleh IMF pada tahun 1947, yang menyatakan bahwa setiap negara bebas mengubah nilai mata uangnya dalam margin kecil (5 % naik atau turun), tetapi lebih dari itu hanya dapat dilakukan oleh IMF (Halwani, 2002: 262).

IMF didirikan sebagai pemberi pinjaman terakhir (*Lender of Last Resort*) untuk pemerintah berbagai negara di dunia. IMF beroperasi atas dasar kontribusi 182 negara anggota. Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar sekitar 18% dari jumlah keseluruhan. Mengingat pendanaan IMF berasal dari negara-negara anggota, kontribusi dan peranan Amerika Serikat di IMF jadi meningkat beberapa kali lipat.

IMF merupakan alat praktis diplomasi tingkat tinggi finansial Amerika Serikat. Pendanaan yang relatif kecil untuk negara berkembang, namun memberikan kesempatan pemerintah Amerika Serikat (bersama-sama pemerintah negara Uni Eropa dan Jepang) secara efektif mengendalikan aliran pinjaman untuk negara berkembang sehingga tidak ada aliran dana yang tanpa persetujuan Konggres Amerika Serikat (Halwani, 2002: 262).

3. 4. Bank Dunia (*The World Bank*)

IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) lebih dikenal sebagai Bank Dunia (*World Bank*) semula didirikan dalam rangka membantu negara-negara yang rusak akibat perang untuk melakukan transisi lewat rekonstruksi. Lembaga ini terikat dengan PBB sehingga anggota *World Bank* juga merupakan anggota dari IMF.

Namun dalam perkembangan situasi dunia yang relatif tidak diwarnai perang lagi fungsi bank dunia pun bergeser. Tidak lagi memprioritaskan proyek rekonstruksi, tetapi lebih sebagai channel untuk menyalurkan dana dari negara-negara kaya untuk

pembangunan ekonomi negara berkembang atau lebih miskin yang membutuhkan. Tujuan sentral dari lembaga ini adalah membantu meningkatkan kemajuan sosial-ekonomi negara berkembang, dengan prioritas mendorong peningkatan produktivitas negara penerima pinjaman atau bantuan. Dalam kerangka ini bank dunia mengumpulkan dana dari negara-negara maju di pasar uang dan meminjamkannya untuk proyek dan program berskala prioritas tinggi di negara-negara yang lebih miskin (Halwani, 2002: 278).

3. 5. General Agreement on Tarif and Trade (GATT)

GATT adalah perjanjian internasional, multilateral, yang banyak mengatur perdagangan internasional sesudah Perang Dunia Ke-II dan didirikan tahun 1948. GATT lahir setelah industri di Barat mengalami banyak proteksionisme dan semangat autarki yang berkembang setelah depresi besar tahun 1929.

Pada masa tersebut, setiap negara membatasi perdagangan impor atau ekspor. Alasannya adalah proteksi untuk produsen, proteksi untuk konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. Negara berkembang cenderung melindungi industrinya yang masih muda (*infant industry*) (Halwani, 2002: 334).

Tujuan GATT adalah:

1. Terjadinya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi.
2. Menempuh disiplin di antara anggotanya supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota lain.
3. Mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak (Halwani, 2002: 334)

Namun, aturan GATT tidak mengharuskan perdagangan bebas tanpa syarat karena dunia memang belum atau tidak mencapai hasil secara utuh. Oleh karena itu, GATT hanya berusaha ke aturan perdagangan yang lebih bebas, atau *fair trade* tanpa diskriminasi untuk memeperbesar pertumbuhan dunia. Pada 8 Desember 1994, disepakati GATT menjadi WTO (*World Trade Organization*) yang menjalankan fungsinya sbagai badan pengawas perdagangan bebas dunia. Namun pada perjalanannya banyak mendapat keluhan dari negara-negara berkembang karena

WTO hanya sebagai bentuk pelecehan terhadap perdagangan global (Halwani, 2002: 343)

3. 6. Parlemen Eropa dan Ideologi Pasar

Sejak diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman pada 9 Mei 1950, Uni Eropa telah berkembang menjadi kekuatan penyeimbang baru terutama bagi negara-negara dunia lama di Eropa Barat dan Selatan. Perluasan Uni Eropa telah menjangkau 25 negara termasuk negara-negara Eropa Timur seperti Rumania dan Bulgaria yang dulunya mempunyai asas sosialis. Uni Eropa merupakan organisasi kawasan yang memiliki Parlemen Eropa yang berkedudukan di Brussel, Belgia yang berfungsi sebagai kuasa sentral negara-negara anggotanya namun tidak menghilangkan eksistensi negara-negara anggotanya. Berbeda dengan organisasi kawasan lain, negara-negara anggota Uni Eropa juga mengalihkan sejumlah kewenangannya pada tingkat Eropa baik melalui Parlemen Eropa atau Dewan Eropa. Maka dapat dibayangkan kedigdayaan dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang meningkat pesat terutama dalam 3 dekade terakhir yang ditandai melalui peluncuran mata uang tunggal Euro pada tahun 1999 yang mulai berlaku pada Januari 2002.

Uni Eropa akan semakin luas jika melihat Turki yang dijadwalkan bergabung tahun 2007 ini dan menjadi kekuatan pemodal baru. Maka di belahan dunia lain ideologi pasar mulai bersemi dan berkembang kembali khususnya di kawasan era dunia lama yang mencetuskan imperialisme dan merkantilisme. Kekuatan penyeimbang baru ini memang terkesan sebagai oposisi hegemoni Amerika Serikat, namun tampaknya UE juga justru akan menjadi pemangsa baru yang dikendalikan roh kapitalisme. Arena dan proses perubahan yang sedang terjadi di Eropa pada dasarnya memberikan ruang gerak baru bagi kapitalisme untuk semakin meneguhkan kuasanya di dunia global ini.

4. Globalisasi Informasi, Kontrol Kapitalis Dan Media Global

4. 1. Media Global

Era kapitalisme lanjut (*late capitalism*) dan modern jelas berpengaruh pada industri media yang juga menggunakan kekuatan modal sebagai komponen industri untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Sebagian besar industri media dikuasai perusahaan TNC yang cenderung melakukan konvergensi industri media tidak saja pada satu domain media tetapi melakukan ekspansi ke wilayah lain. Industri media saat ini menjalani perubahan besar-besaran dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ciri produk media. Thompson mengemukakan perubahan terkini pada industri media global terjadi pada 2 level: pada level ekonomi dan politik, serta level teknologi (Thompson, 2004: 296). Industri media di kalangan barat – dalam banyak hal merupakan organisasi komersial dan kuasi komersial – yang bergerak di pasaran kompetisi dan menjadi kelompok penekan dan pendorong keuangan sehingga berdampak pada komersialisme media.

Lebih lanjut Thompson mengemukakan fokus level politik ekonomi dan menilai kecenderungan industri media sebagai berikut:

1. *Meningkatnya pemusatan industri media*; terkonsentrasi pada perusahaan besar.
2. *Pertumbuhan diversifikasi*; meliputi perluasan aktivitas perusahaan dalam wilayah garis produksi yang berbeda-beda.
3. *Peningkatan globalisasi industri media*; semakin luasnya jangkauan bisnis media.
4. *Adanya deregulasi*; proses penghapusan dari peraturan-peraturan yang dianggap membatasi (Thompson, 2004: 296).

Beberapa fakta kecil yang sejalan dengan fokus tersebut dikemukakan Durham dan Kellner, dimana tercatat di Amerika Serikat terjadi merger masif antara 4 konglomerasi media informasi dan hiburan diantaranya: *Time-Warner* dan *Turner* senilai 7,7 milyar dollar; *Disney*, *Capital Cities*, dan *ABC* senilai 19 milyar dollar; *NBC* dan *Microsoft* senilai 20 milyar dollar; serta *Viacom* dan *CBS* senilai 37 milyar dollar. Bahkan pada Januari 2000 terjadi merger lagi antara *Time-Warner* dan *AOL* (*America Online*) yang nilainya diperkirakan mencapai 163,4 milyar dollar mencakup

penggabungan dalam industri TV, film, majalah, surat kabar, buku, database informasi, komputer dan lain-lain (Durham dan Kellner, 2002: 20)

Sedangkan perkembangan pada level teknologi, industri media juga tergantung dari inovasi terutama dalam ICT dan komputer. Kondisi ini telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam sistem transmisi serta penyimpanan memori informasi yang mengarahkan pada perkembangan industri media serta mengintegrasikannya dalam domain yang lebih luas dalam rangka penyebaran dan kontrol atas informasi.

Kontrol antara industri media tersebut merupakan konsekuensi logis bagi pemilik media seperti misalnya Rupert Murdoch yang mempunyai kontrol atas aset industri media di Inggris, Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara di Kepulauan Pasifik. Kepemilikan Murdoch atas Tabloid *Sun* di Inggris misalnya mengawal sekitar 33 % pemasaran surat kabar terkenal. Murdoch juga mengontrol *Jaringan Fox Broadcasting* dan *Studio 21st Century Fox* di Amerika (Thompson, 2004: 304).

Aspek teknologi dan informasi lainnya dapat memfasilitasi perluasan media melampaui batas-batas negara serta dapat dikembangkan ke arah domain internasional. Peningkatan ini terutama sebagai dampak penemuan teknologi satelit. Penggunaan satelit untuk tujuan komersial merupakan bagian dari proses arus data transnasional yang lebih umum sehingga komunikasi dan informasi dengan cepat menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan dan dikontrol oleh pasar dunia dibawah para kapitalis dan transnasionalis.

Penguasaan modal dalam komponen produksi membawa industri media semakin menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Menurut Schiller, banyak korporasi global dan perusahaan ekonomi swasta raksasa yang mengendalikan industri media sangat mempengaruhi organisasi produksi dan distribusi dalam tujuan perolehan profit serta akumulasi capital sehingga secara drastis akan merubah pasar konsumen (*market condition*) dan kondisi geopolitik (Kellner, 2002: 326).

4. 2. Legal Palement dan Kuasa Kapitalisme Media

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui pentingnya peranan komunikasi sebagai faktor yang potensial bagi usaha untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama internasional serta pemeliharaan dunia. Maka setelah berdirinya UNESCO (*United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization*) pada November 1945 memberikan perhatian yang besar pada masalah informasi dan komunikasi serta melakukan berbagai pemeliharaan perdamaian dunia serta saling pengertian dalam kerjasama internasional (Rachmadi, 1988: 15). Konteks bahwa komunikasi dan media massa harus diikutsertakan dalam tugas memajukan dan pengembangan kerjasama internasional telah tercantum dalam konstitusi UNESCO.

Beberapa badan hasil bentukan PBB juga telah banyak menggunakan media maupun menggunakan media sebagai materi konteks perjanjian dan kesepakatan dalam berbagai programnya. Seperti WTO, IMF, UNESCO, WHO, dan sebagainya dalam beberapa permasalahan menggunakan komunikasi dan media massa sebagai basis misi-misinya. Beberapa diantaranya:

- Perumusan NWICO (*New World Information and Communication Order*) oleh UNESCO yang disepakati Oktober 1983 di Paris, salah satu poin pentingnya adalah agar semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur masing-masing. Sehingga arus informasi tidak semata-mata tergantung pada kantor-kantor berita negara maju (Rachmadi, 1988: 85)
- Pada saat China bergabung dengan WTO pada tahun 2001, komitmen yang tercantum dalam kesepakatan tersebut mencakup pembaruan regulasi perdagangan dalam layanan industri media. China setuju untuk menaikkan kuota film impornya dari 10 ke 20 film pertahun di 2002, dan meningkat menjadi 50 film pada 2005 (Curran, 2006: 165)
- GATS (*General Agrrement on Trade Service*) yang merupakan bagian dari GATT pada tahun 1993 menyetujui liberalisasi perdagangan dalam sektor audiovisual dengan 13 negara dan ternasuk AS dan Inggris dan semakin bertambah. Usaha ini

tetap didominasi oleh perdagangan dari AS dan Inggris terutama dalam industri film

- Kantor-kantor berita terkemuka di dunia setelah masa PD II yaitu *Reuters*, *Associated Press* (AP), *United Press International* (UPI), dan *Agence France Presse* (AFP) mulai memperluas dan mengkonsolidasikan posisinya di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Perluasan secara internasional tersebut secara tidak langsung adalah dampak dari tata informasi dunia yang berfokus pada pelayanan berita di dunia ketiga dalam kerangka PBB.
- Pada tahun 1999 WHO bekerjasama dengan *John Hopkins University Center for Communication Program* (JHU-CCP) yang berbasis di Baltimore, Maryland, melakukan program komunikasi kesehatan dan pencegahan HIV AIDS di Uganda dan Bolivia, yang dinilai berhasil secara masif dalam mempromosikan program televisi dan edukasi asal Amerika Serikat di negara tersebut (O'Sullivan et al., 2005: 230).

Tetapi kondisi-kondisi di atas memunculkan paradoks dan ironi. Hingga musim gugur 1990, beberapa badan PBB seperti WHO, FAO, dan khususnya UNESCO pada umumnya melakukan misi yang banyak menggunakan potensi media massa dan komunikasi yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Amerika Serikat. Masing-masing organisasi tersebut bersama PBB sendiri bahkan pernah menjadi sasaran serangan pemerintah Amerika Serikat dan media massa Amerika. Hal tersebut disebabkan banyak dari misi-misi PBB melalui organisasi tersebut yang tidak mengakomodasi tujuan dan kepentingan Amerika Serikat, seperti kebebasan pers, anti-aborsi, anti-lingkungan, dan konteks militer. Hal tersebut menurut laporan *The New York Times* 13 September 1990, dikarenakan PBB terkendala secara finansial. Pada pertengahan 1990 Amerika Serikat memberi pinjaman sebanyak 750 juta dollar pada PBB khususnya bagi misi WHO dan FAO (Durham dan Kellner, 2002: 324).

Beberapa persetujuan massif dalam pendanaan tersebut terutama dalam program kesehatan, pertanian, dan pendidikan di seluruh dunia. Dikatakan UNESCO merupakan salah satu badan PBB yang pernah menjadi sasaran penting kemarahan

Washington karena merumuskan tata informasi internasional. Bahkan menurut Schiller, Amerika menarik diri dari keanggotaan UNESCO pada tahun 1984. Walaupun demikian beberapa kebijakan seperti embargo Irak pra-invasi dan penempatan militer AS di Arab Saudi mendapat dukungan PBB dan tekanan tersebut sebagian besar dilakukan oleh media massa Amerika (Durham dan Kellner, 2002: 324)

Kondisi yang demikian semakin membuktikan bahwa dalam arena *legal parlement* setingkat PBB atau Uni Eropa maupun konteks kerjasama internasional, peran ideologi kapitalisme terutama dalam perusahaan TNC dan megakorporasi terlihat sangat dominan melalui kekuatan media. Bahkan dalam konteks media massa beberapa bukti menunjukkan bahwa media dapat dijadikan alat dalam negosiasi internasional. Gelinis mengemukakan beberapa karakteristik pasar global yang sering dirujuk sebagai landasan dalam menganalisis kontrol kapitalis atas *legal parlement* dan kerjasama internasional sebagai berikut:

1. Dominasi efektif dari pasar pada konteks sosial dan politik nasional, institusi masyarakat yang dilihat sebagai konsumen individual yang bersifat misal.
2. Ambisi untuk mengkonversi menjadi komoditas dalam domain mata uang, budaya, informasi, pendidikan, kesehatan, air, dan udara.
3. Integrasi seluruh neraca menjadi sebuah model homogen tunggal dalam pembangunan dan perdagangan (gelinas, 2003: 30).

4. 3. Media Massa, Kapitalis, dan Wacana Dunia Ketiga

Melihat kenyataan beberapa *legal parlement* baik PBB maupun UE yang hampir 90 % beroperasi di negara-negara berkembang, maka merujuk pada gagasan George Soros mengenai negara sentral dan periphery, merupakan kondisi yang potensial dalam menerapkan konsep ideologi pasar. Tatanan kapitalisme lunak yang menggunakan alibi-alibi masalah lingkungan, kesetaraan jender, pemberdayaan NGO, dan konsep *geo-economic* (Halwani, 2002: 233) tampaknya senjata yang efektif digunakan di dunia ketiga yang umumnya masih terbelakang.

Negara-negara maju menggerakkan seluruh pasukanya yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan birokrasi yang mereka miliki terutama ke neraca dunia ketiga. Lalu dapat dibayangkan betapa dahsyatnya putaran globalisasi yang merupakan kombinasi antara kekuasaan uang (kapitalisme global) dan kekuasaan politik (negara). Terjadilah lingkup kawasan ekonomi yang menyebabkan pembukaan pasar ke semua negara dunia.

Sementara Steiner (dalam Halwani, 2002: 234) menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan global yaitu: GNP, revolusi teknologi komunikasi dan informasi, dan kekuatan global. Ketiga faktor tersebut merupakan komponen yang seringkali digunakan sebagai indikator kerjasama internasional antara beberapa badan PBB semacam World Bank, IMF, dan WTO. Pinjaman-pinjaman finansial yang ditawarkan pada negara-negara berkembang tersebut merupakan cara mengontrol perekonomian negara pinggir oleh negara pusat seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Apabila kita menengok secara lebih spesifik dalam konteks media massa khususnya televisi, Schiller mengemukakan bahwa pola-pola media massa yang merupakan bentuk kontrol baru terhadap negara dunia ketiga disebabkan akibat konsekuensi tataran geopolitik baru pasca perang dunia II dan akibat penguasaan modal dan perekonomian. Media massa, melalui jaringan TV kabel dan berbagai afiliasinya, digunakan sebagai salah satu alat kontrol. Schiller melalui perspektif media imperalisme menyebutnya sebagai *transnational corporate cultural domination* yang dilakukan korporasi Amerika Serikat melalui perangkat media, PR, periklanan, polling, sponsor budaya, dan konsultan (Durham dan Kellner, 2002: 320).

Lebih lanjut menurut Sinclair, pola-pola aliran komunikasi (*information flow*) menurut pandangan kaum imperalisme media, baik dari segi kepadatan (*density*) dan arah informasi (*direction*), merupakan cerminan dari dominasi ekonomi dan politik negara-negara maju (Sinclair, Jacka, dan Cunningham, 1996: 6). Jadi pusat-pusat dunia semisal New York, Los Angeles, Tokyo, London dan Paris merupakan simpul-simpul utama arus media dan informasi, khususnya dalam program-program televisi. Perspektif ini juga secara khusus melihat bahwa sumber utama dunia dalam program-

program televisi berlokasi utamanya di AS dan kemudian di Eropa. Dominasi alur informasi yang pada muaranya banyak ada di negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin (belahan dunia selatan) tersebut dikatakan Sinclair, Jacka, dan Cunningham merupakan tipikalitas kontrol kutur kapitalis yang diproyeksikan dalam skala internasional (Sinclair et al., 1996: 6-7).

Fenomena di Meksiko, Brazil, dan Negara Merika Latin menunjukkan bahwa stasiun TV *Televisa* (Meksiko) dan *Globo* (Brazil) menjadi transnasionalis yang secara tidak langsung dikendalikan oleh negara di belahan Amerika Utara. Dengan jumlah angka kepemilikan televisi yang mencapai 15,3 juta (Meksiko) dan 38,5 (Brazil), *Televisa* dan *Globo* menguasai hampir 70 – 80 *audience share* di kawasan Amerika Latin (Sinclair et al., 1996: 34). Pasar media Amerika Latin yang dikuasai transnasionalis tersebut ternyata juga merujuk pada kepemilikan maupun kerjasama dengan korporat media dari AS, terutama dalam kerjasama penayangan program televisinya. Fenomena yang sama juga dikemukakan Sinclair di Timur Tengah, India, China, dan Mesir menunjukkan kecenderungan para transnasionalis media dalam menguasai pasar khususnya industri televisi dan jaringan televisi kabel (Sinclair et al., 1996: 1-29).

Transformasi sistem pertelevisian di seluruh dunia merupakan elemen internal dalam fenomena globalisasi ekonomi yang kompleks. Proses tersebut telah memaksa para kapitalis di dunia barat untuk melakukan upaya ‘jemput bola’ terhadap wilayah pinggir di dunia. Runtuhnya komunisme dan peningkatan perekonomian di Asia menyebabkan kuasa kapitalis mengarahkan sasaran pasarnya di kawasan tersebut. Kondisi geopolitik yang demikian membawa implikasi pada ekspansi modal dan strategi korporasi yang besar dalam kaitannya liberalisasi media (Gelinas, 2003: 20)

5. Penutup

5. 1. Simpulan dan Saran

Wacana kapitalisme yang merentang dari masa merkantilisme sampai masyarakat konsumsi sekarang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi manusia fana yang cenderung individualis dan memikirkan dirinya sendiri. Fakta historis menggambarkan bahwa sebagian besar kapitalis melibatkan esensi manusia sebagai omnivora – pemakan segala. Wujud-wujud baru manusia baik dalam kedok organisasi, korporasi, industri, transnasionalis sampai konglomerasi membawa dampak perubahan dan transformasi manusia ke bentuk yang semakin abstrak. Kapitalisme di mulai dari manusia dan suatu saat akan diakhiri manusia jua.

Dalam kerangka perubahan sosial, kapitalisme yang telah menjadi ideologi dan hegemoni terkuat saat ini merupakan sebuah perjalanan yang bersifat *unfinished project* yang melibatkan seluruh spektrum dimensi global. Berawal dari konsep produksi dan kesejahteraan negara (*The Wealth of Nations*) kapitalisme telah menjelma menjadi sistem dunia yang bersiat *omnipresent* (hadir dimana-mana). Sistem perekonomian yang telah menjadi landasan penopang kapitalisme mengarahkan tujuannya sampai batas-batas yang tidak pernah terbayangkan. Kapitalisme telah menjelma menjadi komponen penggerak perubahan sosial terbesar yang sekarang masih eksis disaat lawan-lawan ideologisnya masih mencari eksistensi. Sebagai anak emas peradaban, kapitalisme akan terus dipuja.

Kekuatan daya saing dari para tansnasionalis membuat kekuatan modal mereka menjadi cepat diserap oleh pasar sehingga memungkinkan sektor komunikasi dan media massa memperoleh dana segera dalam ekspansinya. Kekuatan makro ekonomi global juga mendorong media massa tidak sekedar sebagai sarana penyampai ideologi kapitalis melainkan sebagai sebuah institusi yang trurut menjadi aktor demi akumulasi profit dan ekspansi modal. Media dalam konteks institusi yang berada dalam lungkunga suprasistem geopolitik juga membutuhkan pasar sasaran sebagai upaya mengimbangi hukum permintaan dan penawaran. Maka tidak jarang khalayak (audiens) merupakan pasar potensial dalam melanggengkan siklus lingkaran setan kapitalisme global.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revisond, (2003). *Membuka Topeng “Konsensus Washington”*. Harian Kompas Sabtu, 19 April 2003. hal. 40
- Curran, James, (2006) “Media and Cultural Theory in The Age of Market Liberalism. In Curran, James, and Morley, David (eds.) *Media and Cultural Theory*. New York: Routledge.
- Durham, Meenakshi Gigi, dan Kellner, Douglas M. (2002). *Media and Cultural Studies KeyWork*. Boston: Blackwell Publishing.
- Ebenstein, William, Fogelman Edwin, (1994). *Isme-Isme Dewasa Ini*. Terj. Alex Jemadu. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Giddens, Anthony, (1985). *Kapitalisme dan Teori Sosial Moderen: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Terj. Soehebat K. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gélinas, Jacques, (2003). *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*. London: Zed Books
- Halwani, Hendra R. (2002). *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Littlejohn, Stephen W., (2002). *Theories of Human Communication*. Seventh Edition. California: Wadsworth/Thompson Learning.
- McQuail, Denis, (2000). *McQuail’s Mass Communication Theory*. 4th edition, London: Sage Publication.
- McQuail, Denis, (2002). *McQuail’s Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publication
- Miller, Katherine, (2002). *Communication Theories: Perspectives, Process, and Context*. Boston: McGraw-Hill
- Korten, David C. (2002). *The Post-Corporate World, Kehidupan Setelah Kapitalisme*. Terj. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sinclair, John et. al. (1996) *New Patterns in Global Television: Peripheral Vision*. Oxford: Oxford University Press.

- Soros, George, (2006). *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Terj. Sri Koesdiyantimah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Straubhaar, Joshep D. (et. al) (1992). "What Makes News: Western, Socialist, and Third World Television Newscast Compared in Eight Countries". In Korzenny et. al, *Mass Media Effect Across Cultures*. California: Sage Publication.
- Thompson, John B., (2004). *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Jogjakarta: Ircisod.
- Rachmadi, F. (1988). *Informasi dan Komunikasi dalam Percaturan Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wijarnarko, Tulus, (2004). *Pergolakan di Balik The Wealth of Nations*. Ruang Baca Koran Tempo, Desember 2004. hal. 22-23.
- Antisipasilah Perluasan Uni Eropa itu!* Kompas, Minggu 27 Oktober 2002 hal. 4
- Das Kapital, Bisul Revolusi*, Ruang Baca Koran Tempo, Februari 2005, hal 18-20.